

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2010
- Ahmad, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, RajaGrafindo, Jakarta, 2018
- Azhary, Negara Hukum Indonesia, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995
- Djoko Triyatno, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Kontruksi, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Djumialdji, Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- _____, Perjanjian Pemborongan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002
- Hamid Shahab, Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi, Djambatan, Jakarta, 1996
- LKPP, “Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah” dalam Modul PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah” Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang dan Jasa Pemerintah,(2010)
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007
- _____, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2003
- Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Bina ilmu, Surabaya, 1978
- Subekti, Hukum Perjanjian, Cet XVI, Intermasa, Jakarta, 1996

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi
Melalui Penyedia

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa
Pemerintah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Republik Indonesia 1945.

C. Lainnya

[Http://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum/](http://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum/)

<https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/1917>, diunduh pada tanggal 03/01/2022

Iffa Rohmah, Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. 2016,

Lihat dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 yang merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Journal Homepage: <https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/identitas>

Journal Homepage: <https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/identitas>

www.hariankompas.com/diakses tanggal 7 Juli 2021